

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Fungsi lainnya
- TUGAS POKOK : Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian, pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.
- FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah dan badan usaha milik daerah serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas badan usaha milik daerah dan perangkat daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan badan usaha milik daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
4. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
5. Pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya asn di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
6. Pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya manusia badan usaha milik daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Type Pengukuran dan Sumber Data)
Tujuan :		

Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat efektifitas manajemen di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah. • Formulasi Pengukuran : Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. • Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
Sasaran :		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Porsentase rekomendasi bidang perekonomian yang terealisasi	• Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan • Formulasi Pengukuran : jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi dengan jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan • Type Pengukuran : Kumulatif • Sumber Data : Biro Perekonomian
Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian	• Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian • Formulasi Pengukuran : jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian yang menjadi target dibagi dengan jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian • Type Pengukuran : Kumulatif • Sumber Data : Biro Perekonomian
	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang perekonomian yang dievaluasi	• Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui capaian kinerja perangkat daerah bidang perekonomian yang dievaluasi • Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU perangkat daerah bidang perekonomian yang tercapai sesuai target dibagi dengan seluruh jumlah IKU perangkat daerah bidang perekonomian • Type Pengukuran : Kumulatif • Sumber Data : Biro Perekonomian